



PEMERINTAH KOTA BATAM

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2019**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3APKB)
KOTA BATAM TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang selalu menuntun dan membimbing serta memberikan berkah dan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2019 selesai disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Batam sebagai bukti akuntabilitas vertikal. Selain itu, LKJIP juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kotasebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja di masa datang.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan LKJIP ini, dan kami sangat menghargai segala kritik dan saran yang konstruktif demi untuk perbaikan LKJIP ini. Semoga Allah S.W.T tetap membimbing dan menyadarkan kita untuk selalu berkarya lebih baik lagi sehingga Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

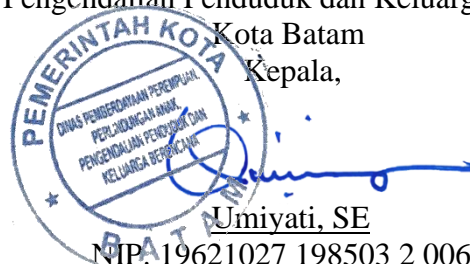
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Batam, Januari 2020

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Batam

Kepala,



 Umiyati, SE
 NIP. 19621027 198503 2 006

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
RINGKASAN EKSEKUTIF		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Dasar Hukum	1
	C. Data Umum Organisasi	3
	D. Sistematika Penyajian	10
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	11
	A. Rencana Strategis	11
	B. Tujuan dan Sasaran	12
	C. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran	14
	D. Rencana Kinerja	15
BAB III	CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	18
	A. Capaian Kinerja	18
	B. Akuntabilitas Keuangan	28
BAB IV	PENUTUP	30
LAMPIRAN		

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2020 merupakan instrumen pertanggungjawaban kinerja mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam. Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini memberikan gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta capaian kinerja (*performance result*) selama tahun anggaran 2019.

Pelaksanaan kinerja pada tahun 2019 ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 sebesar Rp 7,687,859,596.00 dengan dana yang terserap sebesar Rp 5.432.288.137.00 sampai dengan bulan Desember.

Hasil capaian kinerja tahun 2019 menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam telah mencapai beberapa sasaran strategis yang ditargetkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019. Untuk target indikator kinerja IPG dan IDG masing-masing 94,51% dan 58,00% dengan capaian IPG 94,22%, IDG 53,29%. Untuk target indikator kinerja Persentase Perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan 100%, dengan capaian 100%. Untuk target indikator Persentase Pemakaian Kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate/CPR*) 73,00%, capaian target 80,26%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah di Kota Batam, berlangsung dengan mengacu pada perencanaan (jangka menengah) yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Batam dan selanjutnya dijabarkan dalam Renstra setiap unit organisasi. RPJMD dan Renstra unit organisasi memuat visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu menengah (lima tahunan).

Sebagai salah satu bentuk perwujudan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), bertanggungjawab, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan pembangunan, serta sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Gubernur dan Bupati/Walikota wajib untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

DP3APPKB Kota Batam menyusun LKJIP 2019 ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan Tahun 2019 yang telah selesai dilaksanakan. Penyusunan didasarkan pada pencapaian sasaran dan kinerja setiap kegiatan yang berlangsung selama Tahun 2019, dan selanjutnya laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan kegiatan tahun mendatang.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan LKJIP ini adalah :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

LKJIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019

4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 jo. Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. DATA UMUM ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dengan dasar pembentukan SOTK ini adalah;

- PP No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada BAB V Tentang Besaran Organisasi dan Perumpunan Perangkat Daerah, dan pada Bagian tiga tentang Perumpunan Urusan Pemerintahan (pada pasal 22).
- Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Peraturan Walikota Batam No. 47 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengemban tugas dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah secara sinergi berkesinambungan.

Sesuai Peraturan Walikota tersebut kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Batam No. 47 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok adalah membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan Desentralisasi di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, selain tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, membawahi :

1. Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
2. Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik Dan Hukum; dan
3. Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.

d. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahi :

1. Seksi Pengasuhan Alternatif Pendidikan Dan Budaya;
2. Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Hak Sipil, Informasi Dan Partisipasi; dan
3. Seksi Pemenuhan Hak Anak Dibidang Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan.

e. Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan, membawahi :

1. Seksi Pencegahan Dan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan;
2. Seksi Perlindungan Anak; dan
3. Seksi Data Informasi Perempuan Dan Anak.

f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi :

1. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi Dan Pengendalian Penduduk;
2. Seksi Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi; dan
3. Seksi Pendistribusian Kebutuhan Alat Obat Kontrasepsi.

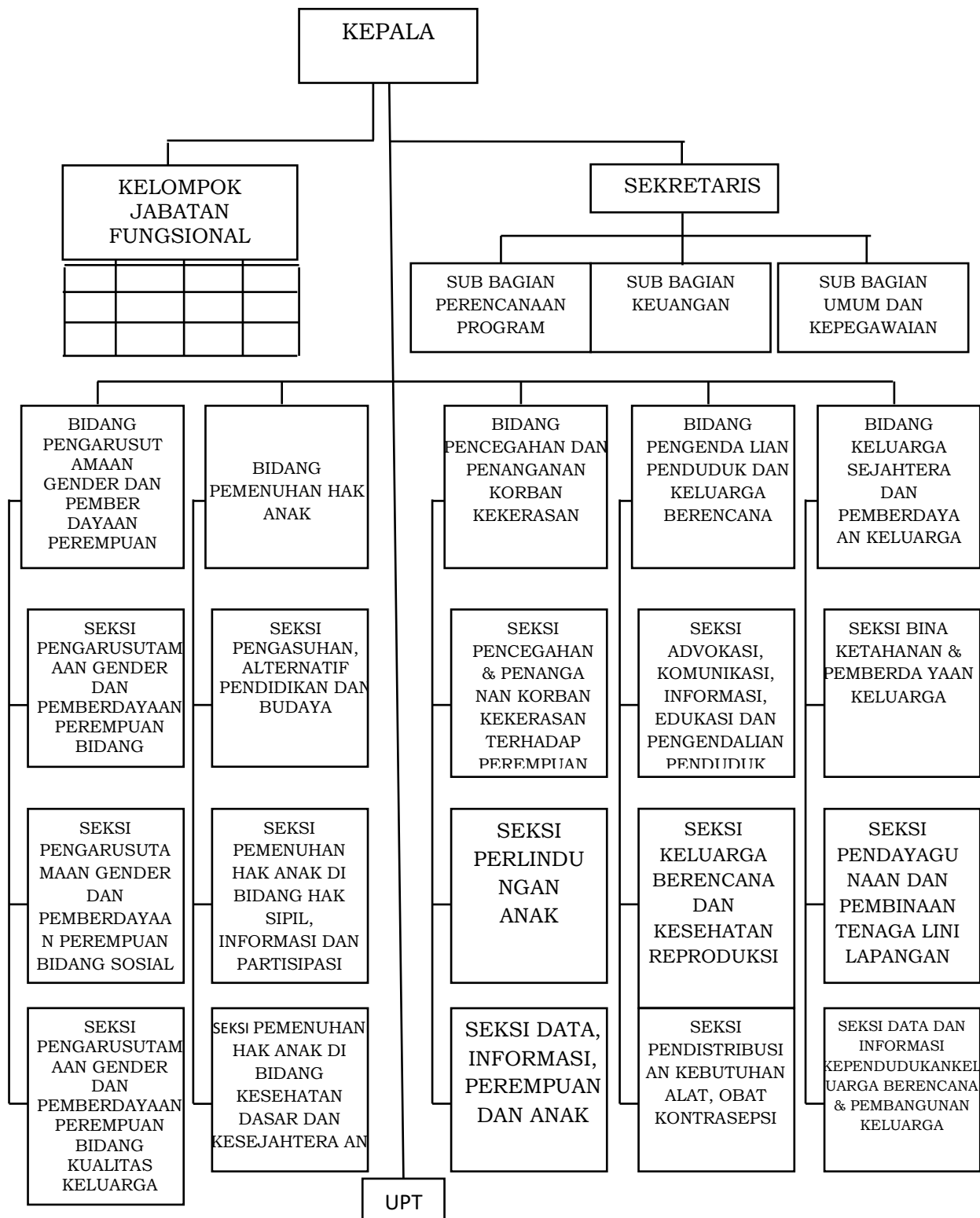
g. Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga, membawahi :

1. Seksi Bina Ketahanan Dan Pemberdayaan Keluarga;
2. Seksi Pendayagunaan Dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan;
3. Seksi Data Dan Informasi Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga;

h. UPT; dan

i. Kelompok Jabatan fungsional

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM**



3. Aspek Strategis Organisasi

Sebagai upaya dalam meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara terus menerus dan berkesinambungan maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis didalam urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kota Batam, yang didalam pelaksanaan otonomi daerah perlu mempertimbangkan berbagai aspek strategis organisasi antara lain berkenaan dengan tugas dan fungsi organisasi sehingga dipandang perlu dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan berwawasan nasional secara optimal dan memadai,
- 2) Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
- 3) Pemerataan dan peningkatan Pelayanan dibidang Keluarga Berencana, kesehatan reproduksi baik berupa pengadaan Alat Kontrasepsi maupun penyediaan petugas layanan.
- 4) Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian Keluarga Sejahtera melalui pembentukan kelompok Bina Keluarga Sejahtera.

Dengan adanya tuntutan baru dalam rangka pemantapan kemandirian dan pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana, maka kedudukan dan peran perempuan perlu mendapat perhatian khusus serta perlu ditingkatkan secara terus menerus, sehingga kedepan terutama untuk tingkat Kabupaten/Kota perempuan menjadi salah satu unsur terpenting dalam keluarga Yang memegang kunci utama keberhasilan pembangunan pada umumnya.

Kemudian yang berikutnya adalah masih adanya kaum perempuan yang latar belakang pendidikannya belum memadai sehingga sangat diperlukan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dan penyadaran gender dimasyarakat tentunya melalui program yang berorientasi pada peran, aspirasi, keutuhan dan permasalahan perempuan secara komprehensif.

4. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam didukung oleh personel/ SDM sebanyak 48 orang dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Menurut Golongan

No	Uraian	Menurut Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Struktural	-	-	20	5	25
2.	Fungsional	-	-	-	-	-
3.	Staf	-	4	6	-	10
4.	Arsiparis	-	-	-	-	-
5.	THD	-	-	-	-	
6.	THL	-	-	-	-	13
Jumlah		-	4	26	5	
Jumlah						48

Tabel 1.2 Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Menurut Pendidikan					Jumlah
		SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1.	Struktural	-	1	-	24	-	25
2.	Fungsional	-	-	-	-	-	-
3.	Staf	-	4	2	3	1	10
4.	Arsiparis	-	-	-	-	-	-
5.	THD	-	-	-	-	-	
6.	THL	1	4	1	7	-	13
Jumlah		1	9	3	34	1	48

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2019. Strategis di sini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Pembobotan dibuat masih sangat terbatas hanya dengan memperhatikan kontribusi kegiatan dalam menyerap anggaran. Berdasarkan realisasi kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian indikator kegiatan dan indikator sasaran. Capaian kinerja per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator input, output, dan outcome.

Laporan akuntabilitas kinerja ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab 1 Pendahuluan menguraikan tentang: Data Umum Organisasi, Aspek Strategis Organisasi, dan Sistematika Penyajian
- Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menguraikan beberapa hal penting dalam perencanaan dan Perjanjian Kinerja
- Bab 3 Akuntabilitas Kinerja menguraikan tentang: Pengukuran Kinerja; Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja; serta Akuntabilitas Keuangan.
- Bab 4 Penutup menguraikan tentang tinjauan secara umum terhadap kinerja yang telah dicapai termasuk upaya strategis untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Batam telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Penyusunannya telah melibatkan seluruh komponen perangkat pemerintahan pada DP3APPKB Kota Batam, yang menempatkan Renstra sebagai komitmen bersama DP3APPKB beserta seluruh karyawan dan staf untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah dan kelembagaan DP3APPKB Kota Batam yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat khususnya selaku aparat terdepan dalam upaya optimalisasi kinerja Pemerintahan di Kota Batam.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam dimulai dengan penetapan visi dan misi yang tidak terlepas dari visi dan misi Kota Batam. Dari Visi dan misi yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya.

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, atisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 , **Visi Kota Batam** adalah ***Terwujudnya Batam Menuju Bandar Dunia Yang Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat.***

Dalam rangka mendukung RPJMD Kota Batam dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas P3APPKB Kota Batam menetapkan Visi :

“Terwujudnya Kesetaraan, Keadilan Gender dan Keluarga Berencana menuju Masyarakat Sejahtera”

2. Misi

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan pernyataan misi sehingga diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat lebih mengetahui peran dan program-program Dinas P3APPKB Kota Batam, sehingga diwaktu-waktu yang mendatang akan diperoleh hasil yang lebih baik.

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan misi Dinas P3APPKB Kota Batam Batam sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dengan memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA).
2. Melakukan upaya pencegahan, penanganan dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Peningkatan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK).

B. TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan (*key performance factors*) yang telah diidentifikasi sebelumnya, yakni telah memperhitungkan kelebihan/kekuatan dan kekurangan/kelemahan serta segala sumber daya yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional.

1. Tujuan

Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan merupakan target kualitatif yang penetapannya telah mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan (*performance indicator*) tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.

Untuk mewujudkan kondisi 1 tahun ke depan sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi, konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam telah berhasil mengidentifikasi tujuan sebagai berikut:

- Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah
- Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan dan perlindungan khusus anak
- Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak
- Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui Keluarga Berencana
- Meningkatkan Keberdayaan keluarga.

2. Sasaran

Dalam usaha pencapaian tujuan, langkah-langkah yang diperlukan diantaranya adalah penetapan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan target kuantitatif yang akan dicapai dalam jangka pendek, yaitu dalam kegiatan operasional, Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses rencana strategis.

Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu satu tahun, guna mencapai tujuan jangka menengah yang telah dirumuskan untuk lima tahun ke depan, atau dengan kata lain sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara periodik baik secara tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Penetapan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat dapat dicapai.

Adapun sasaran sebagai berikut :

1. Misi 1 : *Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dengan memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA).* Peningkatan komitmen kepala daerah dalam pengarusutamaan gender; mengoptimalkan peran kelembagaan Pokja PUG dan focal point perangkat daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender; mengoptimalkan organisasi perempuan dalam rangka pemberdayaan perempuan. Sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.
2. Misi 2 : *Melakukan upaya pencegahan, penanganan dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.* Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatnya kualitas penanganan korban kekerasan, Meningkatnya capaian Kota Layak Anak.
3. Misi 3 : *Peningkatan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK).* Peningkatan rata-rata usia kawin pertama perempuan melalui KIE, optimalisasi peranan kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Ber-KB, Meningkatnya keaktifan kelompok Bina Keluarga, UPPKS dan PIK-R.

C. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran, Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan, dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1) Kebijakan

Kebijakan dalam hal ini adalah pedoman/rambu-rambu pelaksanaan ataupun tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam meliputi kebijakan-

kebijakan yang ditetapkan Walikota Batam dan berbagai kebijakan internal lainnya yang mendasari pelaksanaan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan PUG, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG; Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang
- Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang
- Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian kota layak anak
- Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan
- Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

2) Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program kerja operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam adalah sebagai berikut :

- Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
- Program peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak;
- Program pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;

D. RENCANA KINERJA

Rencana kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut, mencakup periode tahunan dari Rencana Strategis yang telah disusun. Di dalam proses rencana kinerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan. Penjabaran dari seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Batam ini kemudian diformulasikan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan.

1) Proses Penyusunan Rencana Kinerja

Proses penyusunan rencana kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

a) Penetapan Sasaran Strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam mengidentifikasi sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai di Tahun 2018. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

b) Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir Rencana Strategis (RS), diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2018 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

c) Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan. Pada tahap ini didefinisikan indikator kinerja untuk setiap kegiatan.

d) Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

2) Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94.51%
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	58.00 %
		Persentase Perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan	100 %
2.	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/ CPR)	73 %

BAB III
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

A. CAPAIAN KINERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban Kinerja Instansi. Tolak ukur keberhasilan kinerja tersebut mengacu pada ketercapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam yaitu:

1. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga
2. Terkendalinya pertumbuhan penduduk

Indikator Kinerja dan Capaian Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2019)	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94.51%	94.22%
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	58.00 %	53.29%
		Persentase Perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan	100 %	100 %
2.	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/ CPR)	73.50 %	80.26%

Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Ketahanan Keluarga diwujudkan melalui Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dan Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak. Indikator dari perjanjian kinerja Tahun 2019 telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.

Pembangunan manusia berbasis gender memiliki makna perbaikan kualitas hidup yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kualitas hidup dimaksud berkaitan dengan nilai kontribusi, peran aktif serta upaya perempuan dalam mendukung terlaksananya pembangunan kota Batam dari berbagai sektor kehidupan. Kenyataannya masih banyak perempuan yang terkungkung dengan konsep dan pola pikir dan gaya hidup yang konservatif sehingga belum aktif memberikan sumbangsih dalam progress pembangunan kota Batam. Disamping itu, perempuan saat ini masih merasakan adanya diskriminasi sosial yang mengakibatkan adanya kesenjangan antara kaum perempuan dan laki-laki. Dalam hal inilah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Batam melaksanakan berbagai upaya membangun dan menggali potensi diri perempuan kota Batam untuk memperoleh kedudukan dan hak yang seimbang dengan laki-laki pada umumnya dalam mengakses berbagai fasilitas dan sumber penghidupan.

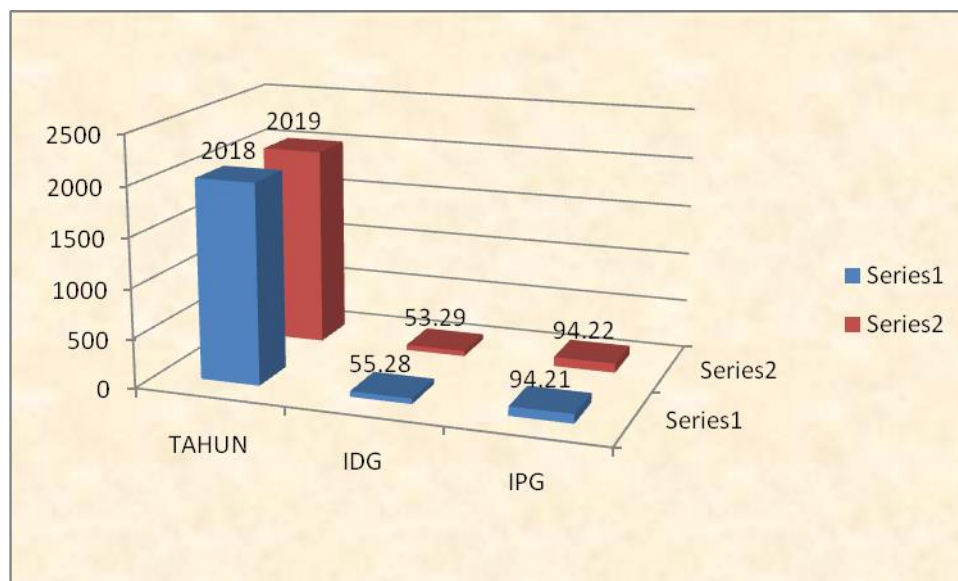
Pada tahun 2019, 300 orang perempuan turut aktif dalam Peringatan HKK PKK Kota Batam, 9000 orang hadir dalam Pembinaan Akhlak Mulia, 500 orang mengikuti kegiatan Halal Bi Halal, 200 orang aktif dalam peringatan hari Ibu, 250 orang mengikuti Pelatihan Workshop Motivasi Pemasaran dan Pemetaan Usaha Ekonomi Produktif, dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM perempuan kota Batam di bidang ekonomi sehingga mampu meningkatkan kontribusi dan keikutsertaannya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dan pembangunan kota Batam. Demikian halnya dalam pelatihan tata rias 900 orang ibu rumah tangga telah berkontribusi aktif mengikuti kegiatan ini.

Disamping itu dilakukan juga upaya optimalisasi peranan stakeholder dalam pelaksanaan program pengarusutamaan Gender yang melibatkan 80 perencana dan staf OPD se-Kota Batam. 80 perencana tersebut telah berkontribusi dalam penyusunan rencana teknis penganggaran program pembangunan kota Batam yang berbasis gender (Ketersediaan anggaran yang mengalokasikan kesetaraan gender/ Gender Analysis Pathway/Gender Budgeting Statement GAB/GBS) Demikian halnya pelaksanaan pemetaan data gender dan anak yang telah disusun melalui pembangunan jaringan SIPUGA (Sistem Aplikasi Pengarusutamaan Gender dan Anak) yang menjadi basis penguatan pembangunan kesetaraan gender kota Batam. Ketersediaan data ini diharapkan dapat memudahkan pemetaan kegiatan

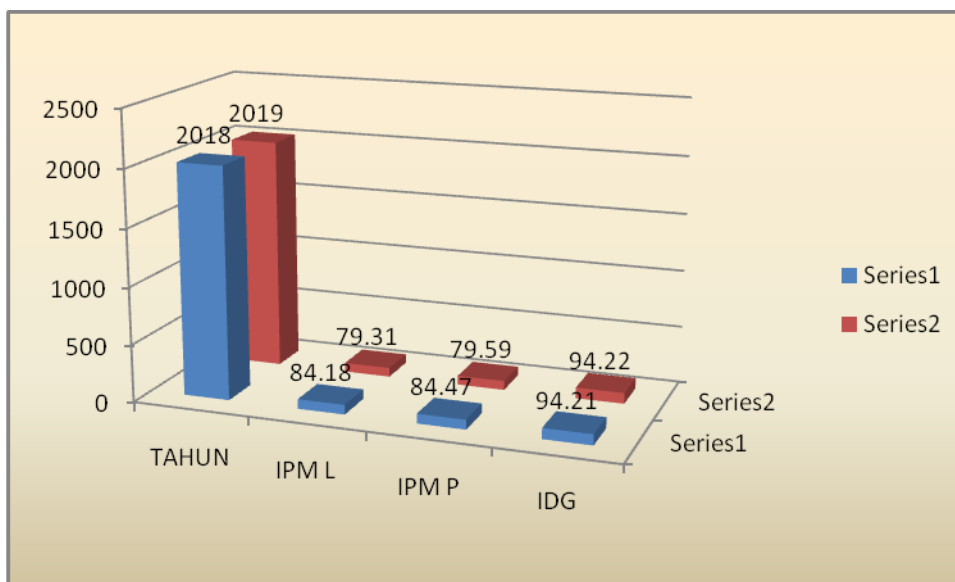
yang akan dilaksanakan di tingkat OPD Pemerintah Kota Batam dalam usaha mencapai kesetaraan gender di seluruh elemen masyarakat.

Melalui program inilah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Perempuan, dan Indeks Pemberdayaan Gender di kota Batam yang berkorelasi dengan pencapaian IPM Kota Batam secara umumnya. Keberhasilan dalam pencapaian ini tentunya melibatkan semua sektor dan unsur-unsur lainnya yang prior dalam usaha pembangunan kota Batam baik dalam level pemerintahan maupun komponen swasta lainnya. Secara umum, dalam mewujudkan kualitas hidup dan potensi perempuan untuk mendorong pertumbuhan taraf hidup masyarakat kota Batam telah dilakukan berbagai langkah progresif yang memacu peran aktif perempuan terlibat langsung dalam mengatasi persoalan-persoalan dalam melangsungkan kehidupan berkesinambungan baik dari segi ekonomi, edukasi, budaya dan sosial.

Menjelaskan kondisi ini sebagai berikut capaian IPG dan IDG Kota Batam Tahun 2019 yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya :



Data Sumber : BPS Kota Batam



Melalui grafik di atas dapat dijelaskan pencapaian IPG Kota Batam sebesar 94.22 yang hampir sama dengan kondisi tahun sebelumnya sebesar 94.21. Pada tahun 2019 IPM Laki-laki sebesar 84.47 dan IPM Perempuan sebesar 79.59. Sedangkan pada tahun 2018 IPM Laki-laki 84.18 dan IPM perempuan sebesar 79.31. Ada peningkatan IPM perempuan sebesar 0.28 dari tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya akselerasi percepatan pembangunan perempuan yang mengikuti percepatan capaian pembangunan laki-laki.

Sebagai berikut komponen IPG Kota Batam Tahun 2019 :

KOTA	UHH		EYS		MYS		PENGELUARAN PERKAPITA		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
BATAM	71.29	75.09	12.94	12.97	11.31	10.91	25.624	16.841	84.47	79.59	94.22

Dari masing-masing komponen, perempuan masih lebih lambat peningkatannya di rata-rata lama sekolah sebesar 10.91 dan pengeluaran perkapita disesuaikan yang hanya sebesar 16.841 dan masih sangat jauh jika dibandingkan dengan laki-laki yaitu sebesar 25.654. Perempuan unggul di umur harapan hidup sebesar 75.09 dibanding laki-laki sebesar 71.29 dan harapan lama sekolah unggul hanya sebesar 0.06 di angka 12.97 dibanding laki-laki 12.94. Namun secara umum, IPG Kota Batam tercapai diatas IPG Nasional yang sebesar 90.99.

IDG Kota Batam pada tahun 2019 sebesar 53.29 capaian ini terlihat menurun 1.99 poin dari tahun sebelumnya sebesar 55.28. Sebagai berikut komponen IDG Kota Batam tahun 2019 :

TAHUN	Keterlibatan dalam Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Profesional	Sumbangan Pendapatan Perempuan
2018	6.00	41.20	28.80
2019	6.00	34.70	28.89

Penurunan ini disebabkan berkurangnya jumlah perempuan di Kota Batam sebagai tenaga profesional baik dalam level manajer maupun direktur yang menurun sebesar 6.5 poin. Hal ini dikarenakan masih kurangnya skill dan kompetensi perempuan dan termasuk diskriminasi gender yang masih membedakan kedudukan perempuan sebagai pemimpin dibandingkan dengan kaum laki-laki. Dalam hal ini, perempuan harus lebih aktif lagi menggali kapasitas dan potensi diri dengan mengikuti kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan untuk mengimbangi akselerasi laki-laki di dalam lapangan pekerjaan. Dalam hal keterwakilan di parlemen perempuan pun masih menunjukkan capaian yang sangat rendah. Demikian halnya dengan sumbangan pendapatan perempuan masih terlihat adanya diskriminasi dimana sumbangan pendapatan perempuan masih di bawah angka rata-rata sumbangan pendapatan laki-laki.

Meskipun capaian IDG ini terlihat menurun dari tahun sebelumnya, namun secara umum melalui program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dan Program peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak sasaran strategis yang ingin dicapai telah terlaksana dengan baik dengan IPG sebesar 94.22 dan IDG sebesar 53.29.

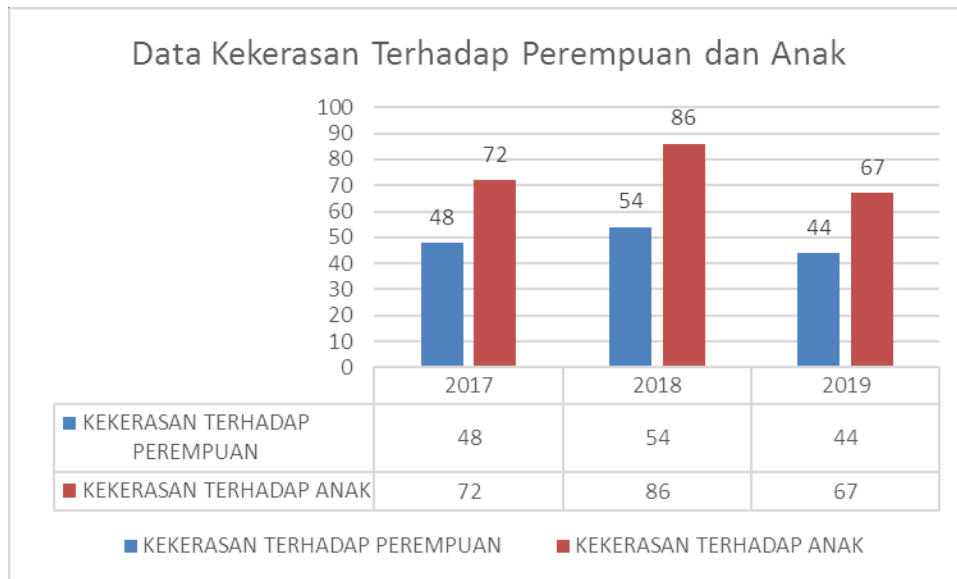
Batam sebagai pusat industri dan wisata tampaknya menjadi daya tarik yang memikat setiap orang untuk mencoba hidup di kota Batam hal ini tentunya memicu tingginya mobilisasi penduduk yang masuk ke Kota Batam yang secara umum menciptakan masalah social yang kompleks dewasa ini. Banyaknya pencari pekerjaan perempuan yang datang yang tidak diimbangi dengan skill yang memadai maupun ketersediaan lapangan pekerjaan menciptakan tingginya angka pengangguran di kota Batam. Secara psikologis hal ini mengakibatkan tingkat stress kehidupan yang tinggi, karena banyaknya pasangan muda yang menikah, sulitnya memperoleh memperoleh sumber penghidupan akibat keterbatasan

lapangan pekerjaan sementara harus membesarkan anak-anak di tengah-tengah keluarga. Akibatnya banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh kaum perempuan.

Di sisi lain Batam sebagai border line dan tujuan transit ke luar negeri mengakibatkan seringnya terjadi tindak perdagangan orang ataupun trafiking, yang pada umumnya dialami oleh perempuan. Seringkali korban dijanjikan pekerjaan ke luar negeri dengan gaji yang tinggi melalui akses keluar kota Batam. Namun ternyata hanyalah sebuah kedok yang berujung pada perdagangan orang dan dipekerjakan sebagai penjaja seks komersil. Fenomena ini bukan lah sesuatu yang langka di kota Batam.

Dalam hal inipun Dinas Pemberdayaan Perempuan telah berupaya semaksimal mungkin menjalin kerjasama dengan jejaring Tindak perdagangan orang maupun kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di kota Batam, diantaranya adalah :Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau(KKP-PMP) Kepri, Yayasan Embun Pelangi, Rumah Faye, Yayasan Dunia Viva Wanita, Yayasan Gerhana, Yayasan Lintas Nusa, LIBAK, Gembala Baik dan stakeholder terkait lainnya baik vertical maupun horizontal.

Sebagai berikut gambaran Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak kota Batam dalam kurun tiga tahun terakhir :



Melalui chart di atas di gambarkan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Batam dalam kurun 3 tahun terakhir angkanya fluktuatif namun bergerak dalam angka rata-rata yang sama. Dari tahun ke tahun terlihat antara jumlah kekerasan perempuan dan anak frekuensinya relative seimbang. Memang dibanding kekerasan terhadap perempuan, tingkat kekerasan terhadap anak angkanya masih lebih tinggi.

Pada tahun 2019 ada penurunan sebanyak 20 % angka kekerasan terhadap perempuan di bandingkan tahun 2018. Demikian halnya kekerasan terhadap anak berkurang sebesar 28%. Data ini sesuai dengan yang dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, P2TP2A dan KPPAD Kota Batam. Dapat dijelaskan bahwa psikologis hidup keluarga yang rapuh dan tidak kuat dalam fondasi nilai moral dan sosial memicu kecenderungan perempuan dan anak mengalami kekerasan.

Sepanjang tahun 2019 sebanyak 43 orang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan 1 orang mengalami trafiking. Demikian halnya children abuse (penelantaran anak) di kota Batam di tahun 2019 sebanyak 67 orang. Dari tiga tahun terakhir menunjukkan angka kekerasan pada anak dalam jumlah yang cukup tinggi. Pada umumnya anak-anak tersebut juga mengalami kekerasan seksual yang meninggalkan trauma psikologis berkepanjangan. Hal inilah yang menjadi salah satu program prioritas Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Batam untuk menggiatkan Perda Nomor : 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan perlindungan Anak, maka dengan aktif mensosialisaikan perda tersebut diharapkan perempuan semakin cerdas dalam membentengi diri dari berbagai tindakan kekerasan demikian halnya anak-anak mendapat perlindungan dan hak hidup sebagaimana mestinya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, dari tahun 2012 s.d. tahun 2019 telah terbentuk 15 Kelurahan Layak Anak, 2 kecamatan Layak Anak (Kecamatan Sagulung dan Lubuk Baja), pembentukan Forum Anak Kecamatan kota Batam di 3 kecamatan (Batu Aji, Sekupang, Sagulung) dan aktif melaksanakan penyuluhan perlindungan anak di kota Batam yang pada tahun 2019 dilaksanakan di 4 kecamatan (Batu Aji, Sagulung, Sei Beduk, Lubuk Baja). Melalui wadah ini diupayakan juga ketersediaan fasilitas-fasilitas yang ramah anak seperti tempat bermain, pojok baca, dan penyediaan klinik laktase di tempat-tempat umum (Mall, bandara, perkantoran, dll).

Dengan demikian pada tahun 2019 telah dilakukan upaya yang sangat baik dalam peningkatan perlindungan perempuan dan anak baik dalam penanganan terhadap korban maupun pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan anak diterima total 111 orang melalui pengaduan dan kunjungan baik melalui Dinas P3A P2 & KB, P2TP2A dan KPPAD Kota Batam. Adapun mekanisme pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan yang dilakukan oleh Dinas P3AP2 & KB Kota Batam maupun P2TP2A Kota Batam tersebut melalui ;

1. Pengaduan / Identifikasi
2. Investigasi
3. Konseling dan Pendampingan korban; Psikologi dan Hukum
4. Penanganan di shelter (Rumah Singgah)
5. Reintegrasi Sosial

Maka pada tahun 2019, target indikator Persentase Perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan telah tercapai 100 %. Dalam hal ketercapaian partisipasi aktif perempuan dan peningkatan perlindungan perempuan dan anak ini, maka kualitas ketahanan keluarga di Kota Batam meningkat sesuai dengan yang diharapkan.

Fenomena sosial yang lain yang penting diperhatikan adalah tingginya tingkat kelahiran bayi di kota Batam. Seperti yang telah dijelaskan di atas penduduk kota Batam berkembang pesat karena tingginya daya tarik dalam lapangan pekerjaan. Umumnya penduduk yang masuk ke kota Batam adalah usia produktif antara 18 s.d. 40 tahun. Pada tahun 2019 populasi kota Batam berjumlah 1.329.773 jiwa meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 234.193 jiwa dari total penduduk 2018, 1.329.773 jiwa. Dan ini menjadi masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kota Batam. Dalam upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Batam meningkatkan sasaran Pasangan Usia Subur dan Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/ CPR).

CPR mempunyai definisi Angka yang menunjukkan banyaknya PUS yang sedang memakai alat kontrasepsi pada saat pencacahan. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Kota Batam Tahun 2019 sebanyak 233.626 pasang. Untuk peserta KB aktif Kota Batam, pada tahun 2019 sebanyak 187.504 peserta. Rumus dari CPR adalah Peserta KB Aktif (PA) dibagi Pasangan Usia Subur (PUS) x 100. Pada tahun 2019 capaian dari indikator ini sebesar 80.23 % dan tercapai melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 73 %. Memang terlihat ada penurunan dibanding pencapaian tahun 2018 sebesar 84.3 %. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pasangan yang memasuki fase menopause dan mengalami kehamilan.

Pencapaian CPR(contraceptive prevalence rate) ini dilakukan melalui penyuluhan dan layanan program keluarga berencana di 12 kecamatan se-Kota Batam. Dengan menggiatkan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK) masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya melaksanakan program KB dalam

keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera sebagai pilar utama pembangunan kota Batam. Remaja sedini mungkin diberikan pemahaman yang matang dalam perencanaan perkawinan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi yang sangat penting dalam melahirkan tunas generasi yang unggul. Pada tahun 2019 telah terdistribusi alat dan obat kontrasepsi ke 78 klinik KB baik pemerintah maupun swasta, terbentuk 8 kelompok PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja), 10 Kelompok BKB-HI (Bina Keluarga Balita), 17 kelompok BKR(Bina Keluarga Remaja), 19 kelompok BKL (Bina Keluarga Lansia) dan 8 kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). Demikian halnya penggerakan kampung KB dilaksanakan dalam upaya mencerdaskan masyarakat tentang konsep dan tatanan nilai pelaksanaan program KB di kota Batam. Penggerakan Kampung KB ini merupakan pemetaan penduduk dengan tingkat kelahiran yang tinggi yang perlu dijadikan prioritas program layanan KB yang didukung oleh kader Petugas Lapangan Keluarga Berencana(PLKB 76 orang), Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD /sub PPKBD 128 orang) sebagai ujung tombak penggerak program KB di kecamatan dan kelurahan. Sejumlah sarana dan prasarana juga diberikan kepada puskesmas pemerintah (1 unit) maupun swasta (19 unit) yakni pengadaan Lemari Penyimpanan Alat kontrasepsi. Demikian halnya sarana dan prasarana PLKB (78 Set), PPKBD dan Sub PPKBD (128 Set) dan Media KIE (24Set).

Dalam hal meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melaksanakan program KB ini, maka ketercapaian Contraceptive Prevalence rate di kota Batam sebesar 80.26 % dapat membantu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk tahun 2019. Dengan kata lain capaian indikator ini terintegrasi dari keberhasilan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, dengan peran serta PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD Kota Batam.

Sebagai berikut Pencapaian Peserta KB aktif pada tahun 2019 :

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF PER KECAMATAN SE KOTA BATAM

NO	KECAMATAN	JUMLAH PUS	PER MIX KONTRASEPSI							JUMLAH PA	% PA/PUS
			IUD	MOW	MOP	IMPLANT	KONDOM	SUNTIK	PIL		
1	Belakang Padang	5379	94	37	9	110	41	1626	504	2421	45.0
2	Batu Ampar	10932	212	123	118	694	1125	4246	2350	8868	81.1
3	Sekupang	34840	1149	1012	132	1699	1884	12067	7647	25590	73.5
4	Nongsa	10153	254	70	26	179	412	2750	1503	5194	51.2
5	Bulang	2241	89	74	0	153	90	800	672	1878	83.8
6	Lubuk Baja	22778	3850	966	83	1226	1825	7314	5142	20406	89.6
7	Sei Beduk	22019	1095	268	118	1506	2415	2610	5032	13044	59.2
8	Galang	2803	37	17	0	439	145	877	795	2310	82.4
9	Bengkong	20430	2998	446	85	897	1110	6226	5641	17403	85.2
10	Batam Kota	30841	2890	571	114	4644	1598	10313	8143	28273	91.7
11	Sagulung	43900	10724	881	163	1700	1391	12091	10528	37478	85.4
12	Batu Aji	27310	1998	1219	172	4349	1293	10064	5544	24639	90.2
	Kota Batam	233626	25390	5684	1020	17596	13329	70984	53501	187504	80,26
	IKP/PPM		5690	9492	113	8025	8452	41263	28313		
	% PA/PPM PER MIX		446,22	59,88	902,65	219,26	157,70	172,03	188,96		
	% PA Per MIX/JML PA		13,54	3,03	0,54	9,38	7,11	37,86	28,53		

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

NO	PROGRAM RPJMD	KEGIATAN	2019		
			TARGET	REALISASI	%
1	2	4	7	8	9
I	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.122.412.298,-	894.006.267,-	79.65
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	133.393.498,-	43.340.000,-	32.49
III	Peningkatan peran serta, dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Peningkatan Peranan Stakeholder Dalam Kelembagaan PUG	76.305.000,-	61.868.200,-	81.08
		Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	738.954.800,-	666.729.400,-	90.23
		Pembinaan Organisasi Perempuan	90.280.000,-	65.280.000,-	72.31
		Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan	339.770.000,-	339.445.000,-	99.90
		Penyediaan dan Pengembangan Data Gender dan Anak	126.975.000,-	124.975.000,-	98.42
IV	Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak	Konseling dan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	321.450.000,-	296.350.000,-	92.19
		Pembentukan dan Fasilitasi Kelurahan Layak Anak (KLA) Kota Batam	322.165.000,-	277.965.000,-	86.28
V	Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Pemantapan Revitalisasi Program KB (DAK)	1.132.275.000,-	879.250.000,-	77.65
		Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)	3.219.609.000,-	1.722.764.270,-	53.51

NO	PROGRAM RPJMD	KEGIATAN	2019		
			TARGET	REALISASI	%
1	2	4	7	8	9
		Pembinaan, Pengembangan Kelompok Ketahanan Keluarga, UPPKS dan PIK Remaja	64.270.000,-	60.613.000,-	93.85
TOTAL			7.687.859.596,-	5.432.288.137,-	70.66

Catatan : Laporan Realisasi s/d 31 Desember 2019

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam untuk Tahun Anggaran 2019 telah terlaksana dengan baik, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun dari sisi keuangannya sehingga secara umum semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan memenuhi Rencana Capaian Kinerja (target) sesuai yang tertuang dalam 2 rencana strategis yang ingin dicapai. Kendatipun didalam pelaksanaan kinerja masih ditemui beberapa kendala dan kekurangan akan tetapi hal tersebut masih bersifat wajar dan secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang dijadwalkan.

“Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2019 merupakan perwaju dan pertanggungjawaban terhadap Penetapan Kinerja”

Dari seluruh Indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis dalam program-program yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah berhasil merealisasikannya. Dan diharapkan capaian ini akan terus ditingkatkan di tahun-tahun yang akan datang dan tetap proaktif merespons segala tantangan yang ada dalam upaya mewujudkan Kesetaraan, Keadilan Gender dan Keluarga Berencana menuju Masyarakat Sejahtera seperti yang tertuang dalam visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.

Sebagai akhir dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam ini, indikator ukuran dan pembuatannya dilaksanakan dengan tetap mengacu dan berpedoman pada aturan baku pembuatan LKjIP yang telah dikeluarkan Pemerintah Kota Batam.

